

Dekadensi Moral Elit Politik Sebagai Ancaman Kesejahteraan Masyarakat

Lailatur Rofidah

Program Studi Hubungan Internasional, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email: lailaturrofidah@gmail.com

Abstract

Moral decadence of the political elites led to the emergence cases that have direct impact to the community. The practice of "Money Politics" as concrete manifestation of moral decadence of the political elites in campaign period led to the biggest case that is corruption. Corruption is not only detrimental to the state but also led to the suspension of infrastructure development, so that the public welfare was inhibited. If moral decadence of the political elites increases, then the public welfare decreases continuously. To handle the moral decadence, we can do some ways, involving moral or character education; establishing knowledge and implementation of Pancasila values; and tighten the law on corruptors.

Dekadensi moral elit politik menyebabkan munculnya kasus-kasus yang berdampak secara langsung kepada masyarakat. Praktik "Politik Uang" sebagai wujud nyata dari adanya dekadensi moral elit politik di masa-masa kampanye yang dapat menyebabkan kasus lebih besar lagi yaitu korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menyebabkan penundaan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat mengalami hambatan. Apabila dekadensi moral di kalangan elit politik semakin tinggi maka kesejahteraan masyarakat akan terus menurun. Dalam menangani dekadensi moral, dapat melakukan beberapa cara yaitu: pendidikan moral ataupun karakter, penanaman pengetahuan dan penerapan nilai-nilai pancasila dan memperketat hukum tentang pemberantas korupsi.

Kata-Kata Kunci: Dekadensi Moral; Kesejahteraan Masyarakat; Penanganan Korupsi

Penerapan Demokrasi

Demokrasi sebagai jalan keluar untuk membuka kebebasan masyarakat dalam memilih pemimpin Negara selaku pelayan masyarakat, dalam menerapkannya

tidaklah semudah teori-teori demokrasi yang hanya sebatas kata-kata. Kebebasan yang diberikan oleh demokrasi kepada rakyat berupa kebebasan menyampaikan aspirasi, kebebasan memilih pemimpin hingga kebebasan mengetahui jalannya suatu pemerintahan. Keuntungan menerapkan sistem demokrasi, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat selaku objek demokrasi, tetapi juga dirasakan oleh subjek demokrasi yaitu pemimpin Negara atau elit politik. Kebebasan untuk memilih calon pemimpin, menjadi ladang keuntungan berpolitik bagi calon wakil rakyat untuk mengambil hati masyarakat. Melalui perang visi-misi, masyarakat mampu menilai mana calon pemimpin yang dapat diharapkan dan mampu mewujudkan keinginan masyarakat sesuai dengan visi—misi yang telah dijanjikan. Visi-misi bukanlah salah satu penentu pemimpin tersebut mampu untuk menjadi pemegang kekuasaan atau tidak, tetapi moral seorang pemimpin juga dibutuhkan dalam memimpin suatu Negara. Moral yang baik mampu menjadi tolak ukur dalam memilih calon pemimpin, sehingga demokrasi dapat terwujud sesuai dengan teori yang telah ada dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Tidaklah mustahil sistem demokrasi menjadi lebih berkembang pesat di beberapa Negara, karena kebebasan sepenuhnya diberikan kepada rakyat dan rakyatpun yang akan menentukan jalannya suatu pemerintahan.

Demokrasi juga dapat mengalami kebekuan, apabila proses demokrasi tidak berjalan dengan baik. Pemerintah sebagai subjek demokrasi menjadi penentu apakah demokrasi dapat berjalan di jalan yang sesuai atau akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Rakyat yang hanya mampu memberikan suara dalam memilih pemimpin Negara, dan hanya mengetahui kebijakan dari pemimpin tersebut melalui visi-misi yang diberikan memang tidaklah cukup. Visi-misi hanya sebatas penarik untuk mendapatkan suara terbanyak, keberlanjutan visi-misi tersebut akan terlihat nyata jika pemimpin tersebut memang benar-benar seorang pemimpin bukan hegemon. Moral dari seorang pemimpin dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana ia mengambil kebijakan yang tepat, dan konsisten dengan apa yang ia janjikan. Penyalahgunaan demokrasi oleh seorang pemimpin yang rendah akan moral dapat menyebabkan keruntuhan sistem demokrasi. Pemimpin yang tidak bermoral, pasti hanya mementingkan dirinya sendiri, mencari banyak keuntungan dari kekuasaan yang telah diberikan dan penyalahgunaan kekuasaan. Apabila pemerintahan dipegang oleh pemimpin yang tidak bermoral, kestabilan sosial, politik dan ekonomi suatu Negara dapat mengalami krisis dan Kesejahteraan masyarakat menjadi taruhannya. Rendahnya moral di kalangan elit politik yang akan menimbulkan dekadensi moral seorang pemimpin dan akan berdampak pada ketidakseimbangan yang merata antara penguasa dan rakyat, karena dengan adanya pemimpin yang rendah moral, kepentingan rakyat disepelekan dan pemerintahan cenderung memikirkan kepentingan yang memegangnya.

Moral di Era Globalisasi

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, perkembangan moral juga perlu diperhatikan dengan seksama. Perkembangan moral di era globalisasi yang kini semakin dipertanyakan. Globalisasi yang tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan tetapi juga membawa dampak negative yang dapat merubah bahkan merusak tatanan kehidupan. Era globalisasi yang didukung oleh terbukanya batas-batas Negara dan semakin canggihnya teknologi memudahkan budaya asing dan produk-produk asing masuk ke Indonesia yang dapat melahirkan Sikap hedonisme dikalangan penerus bangsa. Sikap hedonisme yang didasari oleh keserakahan individu dalam mencari kesenangan tersendiri sehingga mengabaikan moral kehidupan dan cenderung materialistik, hal inilah yang menjadi virus bagi masyarakat Indonesia. Globalisasi yang dapat menggeser budaya moral bangsa dapat mengakibatkan dekadensi moral. Dekadensi moral tidak hanya berdampak pada pemuda Indonesia, tetapi juga pada elit politik selaku petinggi negara. Elit politik sebagai tokoh utama dalam pemerintahan sangatlah berpengaruh dalam mensejahterakan masyarakat, apabila dekadensi moral terjadi dikalangan elit politik akan berdampak pada pembangunan dalam negeri dan mengancam kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dalam negeri sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari sosok pemimpin yang memegang kekuasaan di suatu Negara. Pemegang kekuasaan Negara yang didominasi oleh elit politik, dimana elit politik sebagai tokoh utama dalam memerankan alur kekuasaan dalam negeri, memiliki peran terpenting dalam memenuhi hak-hak masyarakat. Dalam memenuhi hak-hak masyarakat dan juga menjalankan kewajibannya sebagai sosok pemimpin, elit politik diharapkan mampu mencapai cita-cita bangsa dan tetap berlandaskan Pancasila. Indonesia yang menggunakan Pancasila sebagai ideologinya dapat menjadi patokan untuk para elit politik dalam melaksanakan kewajibannya, tidak hanya sebagai patokan dalam menjalankan politik, tetapi juga sebagai patokan moral. Pancasila sendiri yang dikatakan sebagai *religios morality*, karena basis Pancasila juga berdasarkan basis keagamaan.¹ Adanya basis keagamaan, Pancasila memiliki kekuatan untuk membentuk moral bangsa Indonesia terutama moral seorang pemimpin, karena pemimpin yang berkedudukan sebagai penganyom masyarakat dan juga sebagai penentu keputusan Negara secara bijaksana, akan mampu mensejahterakan masyarakat dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin. Dilihat dari sila pertama Pancasila yang menjurus kepada konsep ketuhanan, mampu memberikan pandangan individu ataupun golongan untuk memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adanya agama menjadikan batasan dalam bertindak bagi pengikutnya atau sebagai kaidah-kaidah norma dalam kehidupan. Pancasila menjadi patokan moral bangsa yang beriringan dengan tujuan-tujuan Negara, sehingga peran seorang pemimpin yang bermoral sangatlah dibutuhkan. Eksistensi moral dikalangan elit politik, terutama moral seorang

pemimpin dapat kita lihat dari bagaimana ia memanusiakan manusia, tanpa mengutamakan kepentingan manusia yang dianggap menguntungkan bagi dirinya sendiri, sehingga kepentingan umum terlaksanakan dengan baik. Moral elit politik dalam suatu Negara sangatlah menentukan jalannya pemerintahan, karena elit politik sebagai penegak hukum dan pengambil keputusan secara bijaksana sekaligus menjadi publik figur.

Dekadensi Moral di Kalangan Elit Politik

Sejak runtuhnya orde lama, dekadensi moral bangsa Indonesia sedikit demi sedikit mulai muncul dipermukaan. Dekadensi moral kini tidak hanya nampak di kalangan pemuda Indonesia, tetapi juga di kalangan elit politik ataupun pemimpin. Sistem internasional yang liberal juga menjadi pemicu lahirnya dekadensi moral karena dari sistem liberal tumbuh yang namanya globalisasi, dimana kebebasan individu dijunjung tinggi dan kemudahan keluar masuknya budaya, barang, jasa hingga manusia diseluruh dunia. Adanya pandangan akan kebebasan individu dalam segala aspek (berpikir, berkarya, berpendapat dan bertindak) yang dibawa oleh liberal mampu menimbulkan dampak negatif yaitu sikap tidak peduli dan menyalahgunakan hak-hak individu. Sikap bebas yang dikibarkan tanpa diiringi oleh moral bahkan agama akan berdampak pada tatanan kehidupan, tidak hanya berdampak pada kehidupan individu itu sendiri, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem internasional yang liberal, dimana individu sebagai acuan dasar kehidupan akan membentuk sistem pemerintahan yang demokrasi.

Indonesia yang menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan, dimana rakyat sebagai subjek maupun objek politik dan elit politik hanya sebagai perawat politik se-demokratis mungkin belum tentu keberhasilannya dijamin seratus persen. Semboyan 'oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat' tidak sepenuhnya diserahkan kepada rakyat. Demokrasi yang memudahkan elit politik untuk memperoleh kedudukan di singgasana kepresidenan melalui persaingan politik yang diwujudkan dengan adanya pemilihan umum, dimana rakyat yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya, walaupun calon-calon pemimpinnya hasil dari usungan partai-partai politik, karena Elit politik yang memiliki kekuasaan tertinggi di Negara wewenangnya lebih diakui daripada suara rakyat yang hanya sekedar pendapat ataupun aspirasi.

Etika berdemokrasi di kalangan elit politik dewasa ini belum juga terlaksana dengan baik, kebebasan dalam bersaing merebutkan kursi kekuasaan menjadi medan persaingan kekayaan. Praktik *money politics* adalah salah satu contoh dekadensi moral para elit politik di musim-musim pemilihan umum. Prinsip awal kampanye yaitu jujur, terbuka dan dialogis², tidak lagi terlaksana dengan baik, hilangnya kejujuran elit politik membutuhkan pandangan akan sikap sportif berdemokrasi. Praktik *money politics* menjadi salah satu cara untuk mendapatkan

suara rakyat dengan mudah, dan dengan didukungnya tingkat pendidikan di Indonesia yang masih terbilang rendah ungkap Subandi dalam Berita Satu pada 13/10/13 terutama di pedesaan dan wilayah timur Indonesia, menjadi ladang berpolitik bagi calon pemimpin yang memiliki moral rendah.³

Para elit politik melakukan praktik *money politics* karena mereka mengetahui bahwa kebutaan pengetahuan dan keterbatasan ekonomi yang membuat masyarakat menerima jalan haram tersebut. Hal inilah yang menyebabkan terciptanya dekadensi moral dikalangan elit politik, dimana mereka tidak malu-malu melakukan jalan haram untuk mendapatkan kedudukan tertinggi di Negara. Apabila pelaku *money politics* terpilih menjadi pemimpin negeri akan dapat memicu lahirnya dekadensi moral elit politik yang lebih besar lagi yaitu korupsi, karena mereka telah menempuh jalan haram untuk mencapai kekuasaan Negara, yang mana akan berdampak pada pola pikir elit politik untuk mendapatkan ganti rugi dari uang yang telah dikeluarkannya di masa-masa kampanye. Pemikiran yang seperti ini yang akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, dimana kekuasaan hanya sebagai wadah mencari keuntungan sendiri.

Korupsi sebagai kasus besar adanya Dekadensi dikalangan elit politik dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan masyarakat, para pemimpin yang hanya memanfaatkan kekuasaanya untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Salah satu contoh kasus korupsi yang akhir-akhir ini marak diperbincangkan yaitu kasus korupsi e-KTP. kasus korupsi e-KTP yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 2,3 triliun.⁴ Elit politik memainkan perannya sebagai tokoh serigala berbulu domba, berkeinginan untuk mempermudah masyarakat dalam membuat Kartu Tanda Penduduk tanpa harus ada perpanjangan, malah menjadi ajang berbuat bisnis para elit politik dalam negeri. Keuntungan yang semestinya dirasakan oleh rakyat kini membuahkan kesengsaraan. Disebabkan kasus e-KTP masyarakat kini sulit mendapatkan identitas Negara karena adanya penunduan bahkan kehabisan berkas. Hal inilah menjadi ancaman kesejahteraan masyarakat, hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sesuai kini terhambat. Dekadensi moral pemimpin juga Nampak jelas setelah kasus korupsi e-KTP terungkap, para pelaku korupsi tidak menampakkan rasa bersalahnya pada masyarakat, alasan demi alasan diciptakan untuk menghindari proses hukum dari KPK. Sebagai tokoh terkemuka di Negara, tindakan seperti ini dapat menghilangkan nama baik Negara, bahkan mampu menghapus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, undang-undang dan hukum, sehingga sistem demokrasi akan terbengkalai dan kesejahteraan masyarakat mengalami ancaman.

Ancaman Kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya dinilai dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang sosial. Dalam bidang ekonomi, ancaman kesejahteraan masyarakat berupa penundaan bahkan penurunan pembangunan infrastruktur, dan pengurangan gaji karyawan baik PNS maupun honorer dengan tujuan untuk ganti rugi pada Negara yang menyebabkan pengangguran semakin

meningkat dan kemiskinan sulit diatasi. Sedangkan ancaman kesejahteraan masyarakat dalam bidang sosial akan berdampak panjang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana masyarakat akan cenderung memiliki sifat was was dan tidak mudah percaya terhadap pemerintah, Undang-undang dan peraturan hukum, sehingga menyebabkan ketimpangan demokrasi dan adanya kesenjangan antara pemerintah dan rakyat.

Upaya Penanganan Dekadensi Moral

Budaya moral seorang pemimpin sangatlah dibutuhkan dalam membawa kemajuan dalam negeri, tidak hanya untuk menampakkan keaktifannya mengikuti perkembangan internasional, tetapi juga untuk membawa masyarakat masuk dalam gudang kesejahteraan. Untuk mengatasi dekadensi moral di kalangan elit politik yaitu dengan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila tidak hanya ditujukan untuk elit politik, tetapi juga untuk pemuda-pemuda Indonesia. Pancasila sebagai ideologi Negara dapat dijadikan pandangan bagi seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seorang pemimpin yang menjadi sarana terwujudnya cita-cita bangsa, diharapkan mampu menjunjung moralitas kepemimpinannya. Banyak elit politik yang mampu menempuh pendidikan hingga jenjang profesor, tetapi moralnya tidak mencerminkan manusia yang terdidik, sehingga dekadensi moral seorang pemimpin dapat dengan mudah muncul.

Berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa', membentuk manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama Pancasila 'Ketuhanan yang Maha Esa'. Hal ini dapat diimplementasikan dengan pendidikan moral dan pendidikan keagamaan sejak dini, karena melalui pendidikan moral mengajarkan individu untuk memiliki rasa hormat, tanggung jawab, toleransi, keterbukaan, kejujuran dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa⁵, sehingga moral baik dapat menentukan kemakmuran suatu bangsa. Dari adanya moral yang baik, maka seorang pemimpin mampu menempuh cita-cita bangsa Indonesia yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yakni 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab'. Dalam melihat moral seorang pemimpin dapat diukur dengan sila kedua Pancasila, dimana pemimpin yang baik memiliki sifat; kemanusiaan, adil, dan tentunya beradab. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik mampu membatasi perilaku elit politik, dari sila pertama yang mengajarkan tentang keimanan pada Tuhan yang Maha Esa, akan mampu menumbuhkan sifat-sifat dan tindakan di sila-sila berikutnya, dari sifat kemanusiaan, adil, dan beradab dapat menghasilkan persatuan bangsa, dan dengan mengimplementasikan kepemimpinan yang hikmat, pengambilan keputusan dengan jalan musyawarah dan dengan adanya perwalikan, akan mampu menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pendekatan keagamaan dapat menjadi solusi meminimalisir terjadinya dekadensi moral. Agama yang terdapat rasa iman didalamnya dapat melahirkan tata nilai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu nilai yang dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup ini berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada-Nya.⁶ Tuhan yang tidak pernah memaksa hambanya untuk menuruti keinginan-Nya, sehingga kebebasan menentukan mana yang baik dan mana yang salah diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dengan diberinya kebebasan tersebut, manusia harus menjadi makhluk yang bermoral, dimana mampu bertanggung jawab atas pilihannya, baik pilihan tersebut baik ataupun buruk. Dengan agama dapat menumbuhkan sikap rendah hati. Pendekatan keagamaan dalam pendidikan di Indonesia sangatlah dibutuhkan untuk membentuk manusia yang berakhlak dan memiliki rasa bertanggung jawab, karena kualitas keimanan seseorang menentukan kualitas watak atau moral setiap individu.⁷ Tidak hanya hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhannya harus dilaksanakan secara terus menerus karena semakin erat hubungan manusia dengan Allah, sedikit demi sedikit mampu membentuk kepribadian baik individu.

Memperdayakan pendidikan karakter juga mampu meminimalisir tindakan korupsi, melalui pendidikan karakter mampu mengembangkan kemampuan yang berkelanjutan dalam diri manusia untuk mengadakan internalisasi nilai-nilai sehingga menghasilkan disposisi aktif, stabil dalam diri individu.⁸ Kita dapat melihat dari beberapa Negara yang telah mampu menangani kasus korupsi dalam negerinya yaitu Denmark. Denmark menjadi salah satu Negara yang telah mampu menghapus tindakan korupsi melalui pendidikan moral tentang kejujuran dan menanamkan pola pikir anti-korupsi sejak dini. Dilansir dari pernyataan duta besar Denmark di Indonesia, Casper Kylnge, menyatakan keberhasilan Denmark dalam mengatasi sindikat korupsi yaitu dengan menerapkan toleransi nol terhadap korupsi di berbagai lembaga pemerintahan, dan juga memiliki lembaga anti korupsi di setiap instansi bukan lembaga terpusat seperti KPK, sehingga setiap instansi mampu menangani sendiri kasus-kasus korupsi.⁹ Tidak hanya itu, Denmark juga menerapkan pelatihan anti korupsi yang wajib diikuti oleh pejabat-pejabat public saat mengisi jabatannya, sehingga saat menjalankan tugasnya mereka telah memiliki pola pikir anti korupsi dan mengetahui secara jelas seperti apa itu korupsi dan apa yang akan ditimbulkan dari tindakan korupsi. Dapat dipahami bahwasanya dekadensi moral dapat diminimalisir dengan pembentukan lingkungan yang menjadi pengaruh terbesar dalam pembentukan karakter maupun moral individu, melalui pendidikan formal atau non formal pembentukan lingkungan yang baik dan yang mampu mengarahkan individu menjadi manusia yang bermoral, sehingga saat menjadi panutan dapat menjalankan tanggung jawabnya dan mementingkan kepentingan bersama.

Memperketat hukum menjadi solusi berikutnya dalam mengatasi dekadensi moral seorang pemimpin terutama hukuman terhadap koruptor. Di Indonesia undang-undang tentang hukuman terhadap koruptor tercantum dalam Undang-

undang Pemberantasan Korupsi. Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan yang mengatur tentang dapat dipidana mati bagi seorang koruptor menjadi upaya bangsa Indonesia untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi, tetapi ayat tersebut belum terrealisasi dengan baik, meskipun hukuman mati bagi koruptor telah dilegitimasi namun hakim jarang bahkan tidak pernah menggunakan ayat tersebut untuk memvonis para koruptor.¹⁰ Karena hukuman mati hanya akan diberikan apabila Negara mengalami krisis ekonomi atau dalam kondisi bencana. Dilihat dari permasalahan tersebut, menunjukkan bahwasanya undang-undang tentang tindakan korupsi belum berjalan dengan baik, penerapan hukuman mati bagi koruptor tidak akan terlaksana apabila Negara tidak mengalami krisis ekonomi, dari sini undang-undang hanya diperuntukkan untuk kestabilan Negara atau keuntungan Negara sedangkan kepentingan rakyat terabaikan, padahal adanya tindakan korupsi juga dapat mengancam kesejahteraan masyarakat bahkan dapat membunuh karakter generasi penerus bangsa, sehingga menimbulkan dampak yang begitu panjang. Apabila kebijakan hukum yang seperti ini dilanjutkan dimana hukuman mati bagi koruptor dipraktikkan jika Negara dalam kondisi krisis ataupun mendapat bencana, dapat menghalangi kesejahteraan masyarakat. Keuntungan yang didapatkan Negara tidaklah sebanding dengan keuntungan yang didapatkan masyarakat, padahal penyebab krisis ekonomi Negara yaitu adanya tindakan korupsi, dari masalah ini pemerintah hanya memikirkan keuntungan bagi Negara tanpa memperdulikan aspirasi rakyat dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemberdayaan hukum dan implementasi hukum hendaknya dilaksanakan dengan semestinya.

Penutup

Eksistensi moral dikalangan elit politik sangatlah menentukan dalam mencapai cita-cita Negara. di era globalisasi yang membawa kebebasan individu memberikan dampak buruk apabila kebebasan tersebut tidak diiringi dengan moral dan iman. Kebebasan individu melahirkan sistem demokrasi, yang mana kebebasan rakyat dalam menentukan keberlanjutan Negara diserahkan sepenuhnya dalam memilih seorang pemimpin, walaupun tidak sepenuhnya diserahkan pada rakyat. Seorang pemimpin yang memiliki kewenangan tertinggi dalam Negara dan juga menjadi panutan bagi yang dipimpinnya, selayaknya memiliki moral kepemimpinan. Moral kepemimpinan mampu membawa masyarakat ke dalam lingkaran kesejahteraan, dimana kebutuhan masyarakat dengan mudah didapatkan. Kebutuhan masyarakat yang tidak hanya dalm bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang sosial. Eksistensi moral elit politik Indonesia pernah mengalami dekadensi pada masa orde baru, dimana Indonesia dikuasai oleh para elit politik yang tidak mencerminkan moral seorang pemimpin.

Praktik *money politics* menjadi salah satu contoh dekadensi moral elit politik, dimana mereka menggunakan kekayaan untuk mendapatkan suara rakyat. *Money*

politics sebagai pemicu awal lahirnya dekadensi moral yang baru di kalangan elit politik, yang mana akan memunculkan para koruptor negeri. Korupsi menjadi contoh dekadensi moral yang termasuk besar, melalui dekadensi moral dapat melahirkan ketimpangan-ketimpangan dalam negeri, bahkan mengancam kesejahteraan masyarakat.

Dekadensi moral elit politik dapat diatasi dengan penanaman nilai-nilai Pancasila yang dilakukan sejak dini, tidak hanya untuk para elit politik tetapi juga untuk para penerus bangsa. Pancasila sebagai ideologi Negara, sekaligus sebagai pandangan bangsa yang memuat tentang keagamaan dan juga pandangan hidup, dapat dijadikan pijakan untuk menanamkan moral berbangsa yang baik dan juga mampu mengantarkan ke lingkaran kesejahteraan. Pendekatan keagamaan juga dapat menjadi sarana meminimalisir dekadensi moral. Agama yang kaya akan nilai-nilai positif, mampu memberikan pendidikan moral bagi manusia dan mampu menjadi pondasi bagi manusia dalam menentukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan prinsip keagamaan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pemberdayaan pendidikan karakter dan pemberdayaan hukum, menjadi solusi berikutnya. Pendidikan karakter dapat diimplementasikan sejak dini, melalui pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan Karakter kepemimpinan bagi generasi penerus bangsa akan melahirkan para elit politik yang berwawasan luas akan politik dan memiliki sifat kepemimpinan. Pemberdayaan hukum dapat dilakukan dengan menerapkan hukum-hukum yang telah ada dengan bijaksana, tidak memandang siapa yang akan ditindak, terutama hukum tentang tindak pidana koruptor yang semestinya diaplikasi sesuai dengan yang telah diperbuatnya.

Catatan Akhir

¹ Herman Khaeron, *Etika Politik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), 331.

² Republik Indonesia, *Undang-undang No. 123 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017*, Jakarta, 2016.

³ Ridho Syukro, "Kualitas Pendidikan di Indonesia yang Masih Rendah", *Berita Satu*, 13 Oktober 2013, <http://www.beritasatu.com/pendidikan/144143-kualitas-pendidikan-di-indonesia-masih-rendah.html>.

⁴ Bagus Prihantoro Nugraha, "Kasus e-KTP: Rp 2,3 T Kerugian Negara, 2 Tersangka dan 280 Saksi", *Detik.news*, 9 Maret 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3442042/kasus-e-ktp-rp-23-t-kerugian-negara-2-tersangka-dan-280-saksi>.

⁵ Darmiyati Zuhcdi, "Pendekatan Pendidikan Nilai Secara Komprehensif sebagai Suatu Alternatif Pembentukan Akhlak Bangsa", *Cakrawala Pendidikan*, Tahun XX, No. 3, Juni 2001:162.

⁶ Herman Khaeron. *loc. cit.*

⁷ Darmiyati Zuhcdi. *loc. cit.*

⁸ Siti Irene Astuti. "Pendidikan Holistik dan Kontekstual dalam Mengatasi Krisis Karakter di Indonesia", *Cakrawala Pendidikan*, 2010:46.

⁹ _____, "Ini Rahasia Denmark Bersih dan Bebas dari Korupsi", *Tempo.co*, 15 Maret 2016, <https://nasional.tempo.co/read/753853/ini-rahasia-denmark-bersih-dan-bebas-dari-korupsi>.

¹⁰ Edi Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza, "Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)", *Legitimasi*, Vol. VI, No. 1, Januari-Juni 2017:163.

Daftar Referensi

Astuti , Siti Irene. *Pendidikan Holistik dan Kontekstual dalam Mengatasi Krisis Karakter di Indonesia*. Yogyakarta: Cakrawala Pendidikan, 2010, Tahun XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY.

Khaeron, Herman. *Etika Politik*. Bandung: Nuansa Cedekia, 2013.

Nugroho, Bagus Prihantoro. *Kasus e-KTP: Rp 2,3 T Kerugian Negara, 2 Tersangka dan 280 Saksi*. Detik News, 9 Maret 2017.

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 123 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017*. Jakarta, 2016.

Syukro, Ridho. 2013. *Kualitas Pendidikan di Indonesia yang Masih Rendah*. Berita Satu, 13 Oktober 2013.

_____. *Ini Rahasia Denmark Bersih dan Bebas dari Korupsi*. Tempo.co, 15 Maret 2016.

Zuhcdi, Darmiyati. *Pendekatan Pendidikan Nilai Secara Komprehensif sebagai Suatu Altefnatif Pembentukan Akhlak Bangsa*. Yogyakarta: Cakrawala Pendidikan, 2001, Tahun XX, No 3.